BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan teknologi dan ekonomi di setiap negara pasti membutuhkan pemerintahan yang baik atau yang sering disebut dengan *good governance*. Pemerintah yang baik ini merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Untuk pencapaian tujuan tersebut setiap pemerintah harus dapat mengelola sumber daya yang ada, salah satunya yang terpenting adalah keuangan. Peran serta masyarakat dalam pemerintah sangat besar. Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya perhatian masyarakat terhadap penyelenggaran pemerintah, terutama dalam pelaksanaan perekonomian negara.

Pemerintah adalah entitas pelapor yang harus membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawabannya karena: (a) pemerintah menguasai dan mengendalikan sumber-sumber yang signifikan, (b) penggunaan sumber-sumber tersebut oleh pemerintah dapat berdampak luas terhadap kesejahteraan dan ekonomi rakyat, dan (c) terdapat pemisahan antara manajemen dan pemilikan sumber-sumber tersebut. Pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji, mengingat semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Tuntutan yang semakin besar terhadap akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen pemerintahan (sektor publik) untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada publik, salah satunya ialah laporan keuangan.

Dalam rangka mewujudkan *good governance* baik dalam proses pengelolaan keuangan, penyajian laporan keuangan serta akuntabilitas keuangan pemerintah, telah dilakukan beberapa upaya-upaya yang diantaranya: pada kurun waktu tahun 1999 sampai dengan 2005 telah dikeluarkan paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yang meliputi Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiga paket undang-undang ini merupakan produk legislasi sebagai wujud dari kehendak untuk melaksanakan reformasi di

bidang keuangan negara sekaligus menurut suatu perubahan mendasar di bidang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.

Dengan adanya laporan keuangan baik keuangan pusat maupun daerah diharapkan dapat dikelola dengan baik dalam rangka mengelola dana publik secara transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel. Adanya laporan keuangan tersebut perlu dipertimbangkan lebih lanjut kegunaan laporan sebagai suatu kewajiban belaka tanpa mejadikan keuangan itu sebagai sumber informasi untuk menentukan dan mengambil kebijakan dalam mengembangkan dan menumbuhkan wilayahnya.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu pemerintah daerah harus memperhatikan informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Laporan keuangan juga harus bersifat transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel.

Kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai dan manfaat yang disebutkan dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintah (PP No. 71 Tahun 2010) diantaranya relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Unsur-unsur dalam laporan keuangan yang akan disampaikan meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) akan disampaikan kepada Badan Pengawas Keuangan (BPK), auditor independen akan mengaudit laporan keuangan pemerintah guna untuk mengetahui tingkat kualitas informasi yang dimiliki oleh LKPD tersebut. Penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), selain itu penyajian laporan keuangan harus patuh terhadap perundang-undangan yang berlaku, kualitas sistem pengendalian internal, bukti-bukti yang memadai dan penyajian laporan keuangan secara keseluruhan yang nantinya akan menjadi pertimbangan di dalam pemeriksaan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat Opini yang diberikan

pemeriksa yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan, Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dn Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Hal yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah pemanfaatan teknologi informasi. Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat menyediakan informasi atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan informasi akuntansi yang akan digunakan manajer publik dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi secara tepat waktu, relevan, akurat dan lengkap. Oleh karena itu dibutuhkan suatu teknologi sistem informasi (*Hardware* dan *Software).*

Manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi adalah kecepatan pemrosesan dan atau transaksi dan penyiapan laporan, dapat menyimpan data dalam jumlah yang besar, meminimalisasi terjadinya suatu kesalahan, dan biaya pemrosesan lebih rendah. Akan tetapi, jika teknologi informasi tidak dapat dimanfaatkan secara optimal maka implementasi teknologi informasi akan menjadi mahal (Indriasari dan Nahartyo, 2008). Hal ini terkait dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan, kondisi sumber daya manusia yang ada tidak mempunyai cukup pengetahuan untuk memanfaatka teknologi informasi tersebut, dan kendala lainnya yang merupakan keterbatasan dana untuk mengimplementasikan teknologi informasi (Karmila, 2012:28).

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah. Adanya penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintah, otomatis juga menuntut aparatur harus mengubah dalam menyelesaikan pekerjaannya dari semula manual menjadi terkomputerisasi (Hamzah, 2009). Terlebih jika teknologi informasi yang ada tidak atau belum mampu dimanfaatkan secara maksimal maka implementasi teknologi menjadi sia-sia dan semakin mahal. Kendala penerapan teknologi informasi antara lain berkaitan dengan kondisi perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan, pemutakhiran data, kondisi sumber daya manusia yang ada, dan keterbatasan dana. Kendala ini yang mungkin menjadi faktor pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintah belum optimal.

Kualitas laporan keuangan juga dipengaruhi oleh sistem pengendalian intern pemerintah itu sendiri. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan akan keandalan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, yang mana akan menghasilkan laporan keuangan yang mempunyai nilai informasi. Sistem pengendalian yang efektif mengacu pada langkah-langkah pengendalian yang efektif yang dibentuk oleh organisasi dengan tujuan menjamin keandalan catatan baik keuangan maupun non keuangan seperti kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang akan menjamin tercapainya tujuan organisasi (Badara, 2013:18). Dalam Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan bahwa tujuan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya: (a) efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, (b) kendala laporan keuangan, (c) pengamanan aset negara.

Grafik 1.1

Perkembangan Opini LKPD Tahun 2014-2018

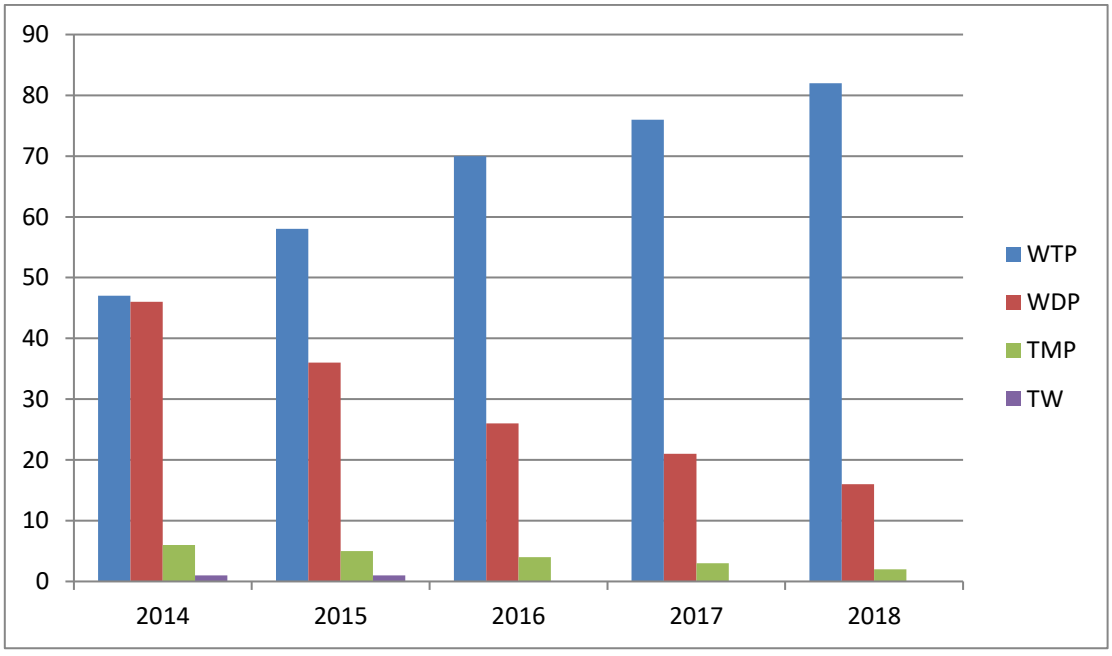

Sumber: IHPS I 2019, BPK RI

Dari tabel di atas terlihat bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD dari tahun 2014 sampai 2018 mengalami peningkatan, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menurun dari tahun 2014 sampai 2018 dan juga opini Tidak Memberi Pendapat (TMP)

mengalami penurunan yang artinya hasil penilaian LKPD dari tahun ke tahun semakin membaik. Namun demikian, tetap saja ada beberapa pemerintah daerah yang masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan opini Tidak Memberi Pendapat (TMP) sehingga perlu menjadi perhatian pemerintah tentang apa saja penyebab dari pemerintah daerah belum mendapat opini Wjajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pemerintah daerah juga perlu untuk meningkatkan sistem pengendalin internal terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan wajar yang juga merupakan suatu gambaran dari pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.

Tabel 1.1

Daftar Opini LKPD Pemerintah Kabupaten Klaten

No	Tahun	Opini
1	2014	Wajar Tanpa Pengecualian
2	2015	Wajar Tanpa Pengecualian
3	2016	Wajar Dengan Pengecualian
4	2017	Wajar Dengan Pengecualin
5	2018	Wajar Tanpa Pengecualian

Sumber: https://semarang.bpk.go.id/?page_id=9051

Tabel di atas menjelaskan bahwa adanya perubahan opini yang terjadi pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Klaten. Pada tahun 2014 dan 2015 Pemerintah Kabupaten Klaten memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tahun 2016 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang disebabkan oleh ketidaksesuaian pada laporan Dana Desa. Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Klaten kembali mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang disebabkan oleh ketidaksesuaian penyajian akuntansi pada dana Bantuan Opersional Sekolah (BOS). Namun pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Klaten menaikkan prestasinya dengan memeperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berjalan sesuai dengan tujuan yang ditargetkan.

Penelitian mengenai topik penerapan sistem akuntansi daerah juga telah dilakukan oleh Aditya (2018) yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

(SAKD) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung" (Studi Kasus Pada BPKAD Kota Bandung), hasil penelitian ini menunjukkan baik secara parsial maupun simultan, sistem akuntansi keuangan dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian mengenai sistem akuntansi daerah dan kompetensi sumber daya manusia juga menunjukkan hasil negatif terlihat dari penelitian yang dilakukan oleh Haty (2018) yang berjudul "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" (Studi Empiris Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta). Dari penelitian tersebut memiliki hasil penerapan standar akuntansi pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan sistem pengendalian internal dan kompetensi staf akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dari penjelasan di atas, adanya perbedaan hasil penelitian dan juga dari daftar opini LKPD Pemerintah Kabupaten Klaten yang memiliki perbedan dari tahun 2014-2018, dan ingin lebih mengeneralisasi hasil, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul "**Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah " (Studi Empiris Pada Dinas-Dinas SKPD Di Kabupaten Klaten).**

1.2.Rumusan Masalah

Beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini:

1. Apakah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Klaten?
2. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Klaten?
3. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Klaten?
4. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Klaten?

5. Apakah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi informasi secara simultan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Klaten?

1.3.Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penulis hanya memfokuskan pada batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya fokus pada pengujian terhadap empat faktor yang diduga mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi.
2. Penelitian ini dilakukan pada 24 Dinas SKPD di Kabupaten Klaten.

1.4.Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Klaten.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Klaten.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Klaten.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Klaten.
5. Untuk menguji secara empiris dan simultan pengaruh positif simultan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Klaten.

1.5.Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat bagi Pemerintah Daerah:

1. Memberikan bukti secara empiris pengaruh positif sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Klaten.
2. Memberikan bukti secara empiris pengaruh positif sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Klaten.
3. Memberikan bukti secara empiris pengaruh positif sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Klaten.
4. Memberikan bukti secara empiris pengaruh positif pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Klaten.
5. Memberikan bukti secara empiris dan simultan pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Klaten.

1.5.2. Manfaat bagi pembaca:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi para mahasiswa dan dan menjadi acuan bagi penelitian di bidang yang sama yaitu pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, serta menjadi bahan referensi bagi peneliti yang melakukan pengamatan secara mendalam dan informasi tambahan bagi setiap pembaca.

1.5.3. Manfaat bagi penulis:

1. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang dan untuk meraih gelar sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Solusi Bisnis Indonesia.
2. Hasil penelitian ini juga melatih kemampuan teknis analitis yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan dalam melakukan pendekatan terhadap suatu masalah, sehingga

dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam berkaitan dengan masalah yang diteliti.

1.6.Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Bab ini berisi teori per masing-masing variable, kajian pustaka, perumusan hipotesis, dan model penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis data dan variabel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV DATA DAN ANALISIS DATA

Bab ini berisi analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai hasil pengolahan data.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang perlu disampaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir. 2014. ***Pengenalan Sistem Informasi.*** Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.

Aditya, A Pane. 2018. ***Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kecurangan Survei Pada Pemprov Sumatera Utara***. Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 4(2):40-48.

Arens et al. 2011. ***Jasa Audit dan Assurance***, Alih bahasa Amir Abdu Jusuf, Buku 1, 2011, Jakarta: Salemba Empat.

Ariesta, Fadila. 2014. ***Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Dan Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Padang).*** EJurnal, Universitas Negeri Padang.

Astuti, Y. T., & Binawati, E. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Komisaris Independen, Umur Perusahaan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Islamic Social Reporting Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Indeks (JII) Periode Tahun 2013-2017. *Jurnal Optimal*, *17*(1), 149-157.

Binawati, E., & Badriyah, N. (2022). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Magelang. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, *2*(1), 32-49.

Badara, M.S., dan Saidin. 2013. ***Pengaruh Sstem Pengendalian Intern dalam Audit Internal Paada Laporan Keuangan Daerah.*** *Journal of Social and Develpoment Sciences:16-23.*

Bastian, Indra. 2006. ***Akuntansi Sektor Publik.*** Jakarta: Erlangga.

Bastian, Indra. 2010. ***Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar***. Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga.

Binawati, Enita. 2015. ***Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Dan Akuntanilitas Sektor Publik Studi pad Pemerintah DIY.*** Jurnal Wahana. Vol. 18 No.01.

Binawati, E., & Nindyaningsih, C. T. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Optimal*, *19*(1), 19-39.

Binawati, E. (2015). Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dan Akuntabilitas Sektor Publik Studi pada Pemerintah DIY. *Wahana*, *18*(1), 1-19.

Chodijah, Siti dan Hidayah, Nurul. 2018. ***Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Skpd Provinsi Dki Jakarta).*** Jurnal Tekun. Vol8. No. 1.

COSO. 2013. ***International Control – Integrated Framework: Executive Summary.*** North Carolina: Durham.

Erlina, Rasdianto. 2013. ***Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual.*** Medan: Brama Ardian.

Febianti, Irma. 2018. ***Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Survei Pada Pemerintah Kota Bandung.*** Skripsi. Universitas Pasundan Bandung.

Geovannie, HL. 2016. ***Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Kesesuaian Tugas-Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Individual Instansi Pemerintahan Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan.*** Jurnal. Vol.08 No.01.

Ghozali, Imam. 2011. ***Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSSS.*** Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, Imam. 2016. ***Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23***. (Prayogo, Ed.) (8th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Halim, Abdul. 2007. ***Akuntansi Keuangan Daerah.*** Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.

Halim, Abdul dan M. Syam Kusufi. 2013. ***Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah.*** Jakarta: Salemba Empat.

Harahap, Sofyan Syafri.2007. ***teori Akuntansi.*** Edisi Revisi. Jakarta: PT. Kerja Grafindo Persada.

Herry. 2014. ***Auditing I, Dasar-Dasar Pemeriksaan Akuntansi***. Jakarta: Kencana.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2010. ***Penrnyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PASAP) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).*** Jakarta.

Indriasari, Desi & Ertambang Nahartyo. 2008. ***Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir.*** Pontianak: Simposium Nasional Akuntansi XI.

International Federation of Accountants (IFAC) dalam IASB. 2014. ***Handbook of International Education Pronouncement.*** New York: http://www.ifac.org.

Irwansyah, Edy dan Jurike V. Moniaga. 2014. ***Pengantar teknologi Informasi***. Yogyakarta: deePublish.

Jogiyanto, 2010. ***Sistem Teknologi Informasi. Pendekatan Terintegrasi: Konsep Dasar, Teknolgi, Aplikasi, Pengembangan dan Pengelolaan.*** Yogyakarta:Andi Offset.

Karmila, Tanjung, dan Darlis. 2012. ***Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, dan Pengendalian Intern Terhadap Ketarandalan Pelaporan Keuangan Pemerinth Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Riau)***. Jurnal Sorot. Vol. 09 No. 01.

Krismiaji. 2015. ***Sistem Informasi Akuntansi.*** Edisi Keempat. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mahmudi. 2010. ***Manajemen Kinerja Sektor Publik.*** Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mahmudi. 2016. ***Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.*** Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. 2002. ***Akuntansi Sektor Publik***. Yogyakarta: Andi.

Mulyadi. 2013. ***Auditing***. Jakarta: Salemba Empat.

_____. 2008. ***Auditing Buku 1.*** Jakarta: Salemba Empat.

_____. 2014. ***Sistem Akuntansi***. Yogyakarta: Salemba Empat.

_____. 2016. ***Sistem Akuntansi.*** Yogyakarta: Salemba Empat.

Maysaroh, Katin Wilda. 2018. ***Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Persepsi Aparatur Pemerintah Daerah pada SKPD Kabupaten Sukoharjo).*** Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Mustafa, Santiadji. 2010. ***Analisis faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Keandalan dan Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pada SKPD Pemerintah Daerah Kota Kendari.*** Skripsi. Universitas Haluleo.

Pasha, Arizal. 2018. ***Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern, dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Grobogan.*** Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Patra, A. Dahri Adi, Lanteng Bustami, Hasriani. 2015. ***Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.*** Jurnal Akuntansi, Vol. 02 No. 01.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil.

Permendagri Tahun 2007 Nomor 59 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Prabangsari, Anissa Putri. 2018. ***Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan daerah, Sistem pengendalian Intern dan kompetensi sumber daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan keuangan Dengan Standar akuntansi Berbasis Akrual Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Badan Dan Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri).*** Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis universitas Muhammadiyah Surakarta.

Pujanira, Putriasri. 2017. ***Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY.*** Jurnal Nominal / Volume VI Nomor 2.

Ramadhan, R., & Binawati, E. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Menggunakan Metode Mix Method (Pada Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Kota Yogyakarta). *Kajian Ekonomi Dan Bisnis*, *15*(1).

Rahayu, S. B., Widodo, S., & Binawati, E. (2019). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi lembaga zakat terhadap tingkat kepercayaan muzakki (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat Masjid Jogokariyan Yogyakarta). *Journal of Business and Information System (e-ISSN: 2685-2543)*, *1*(2), 103-114.

Ramadhan, Haty, Febrian dan Trisnawati. 2018. ***Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber daya Manusia, Dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta.*** Sripsi Thesis. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Rudolf Wennemar Matindas. 2013. ***Manajemen Sumber Daya Manusia, Lewat Konsep Ambisi, Kenyataan dan Usaha.*** Edisi Kedua. Jakarta: Grafiti.

Situmorang, Jonny. 2016. ***Pengaruh sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Studi Pada Dispenda dan Inspektorat Pemerintah Kota Cimahi.*** Skripsi. Universitas Pasundan Bandung.

Sudarmanto. 2015. ***Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM.*** Edisi Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Susliyanti, E. D., & Binawati, E. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Dan Akuntabilitas Kinerja Terhadap Kepercayaan Dan Kepuasan Masyarakat Atas Penggunaan Dana Desa. *Efektif Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *11*(1), 1.

Sugiarto. (2017a). ***Metodologi Penelitian Bisnis.*** (Yeskha, Ed.) (1st ed.). Yogyakarta: Penerbit ANDI.

Sugiarto. (2017b). ***Metodologi Penelitian Bisnis***. (Yeshkha, Ed.) (1st ed.). Yogyakarta: Penerbit ANDI (Anggota IKAPI).

Sugiyono. 2012. ***Metode Penelitian Bisnis.*** Cetakan ke Duabelas. Bandung: CV Alfabeta.

Sugiyono. 2013. ***Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods).*** Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2014. ***Metode Penelitian Bisnis.*** Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2016. ***Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*** Bandung: Alfabeta.

Susilawati. 2014. ***Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Pengendalian Intern sebagai AntesedenKualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.*** Skripsi. STIE STEMBI.

Sutarman. 2009. ***Pengantar Teknologi Informasi.*** Jakarta:Bumi Aksara.

Triyani, Zelda. 2018. ***Pengaruh Sistem Informasi akuntansi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Studi Pada Dinas Kota Bandar Lampung dan Kota Metro.*** Skripsi. Universitas Lampung Bandar Lampung.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Wirawan. 2009. ***Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia: Teori Aplikaso dan Penelitian.*** Jakarta: Salemba Empat.

Yendrawati, Reni. 2013. ***Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Faktor Eksternal Sebagai Variabel Moderating.*** Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia. Vol. 17 No.02.

https://semarang.bpk.go.id/?page_id=9051

https://bpk.go.id

https://klatenkab.go.id/laporan-keuangan-pemkab-klaten-2018-meraih-opini-wtp/